

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dengan berlangsungnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung di era reformasi, maka pada aras daerah pun pemilihan kepala daerah sebagai pejabat publik juga dilakukan secara langsung sejak tahun 2005. Perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari sistem perwakilan ke sistem langsung telah menunjukkan tingkat demokratisasi di daerah. Kendatipun pada satu sisi Pemilukada telah memperlihatkan aspek demokratisasi di daerah, namun pada sisi yang lain terdapat paradoks demokrasi yang terlihat pada pelaksanaan Pemilukada. Paradoks diseputar Pemilukada tersebut adalah adanya fenomena konflik politik pada pelaksanaan Pemilukada.

Di era otonomi daerah, potensi konflik politik di seputar Pemilukada merupakan fenomena yang hampir dapat ditemui di daerah-daerah yang melaksanakan Pemilukada, sekalipun eskalasi konfliknya berbeda-beda. Konflik politik yang mengiringi pelaksanaan Pemilukada bisa ditemui pada masa-masa persiapan, saat pelaksanaan pemilihan dan pasca pemilihan.

Kualitas Pemilukada tahun 2010 di berbagai daerah lebih buruk jika dibandingkan dengan periode 2005. Jeri Sumampaow, coordinator komite pemili Indonseia (Tepi) dalam diskusi bertajuk “Evaluasi PILKADA 2010” di kantor KPU mengatakan: “ Kami catat ada 91 Pemilukada pada April-Juni 2010,

sebagian besar menuai masalah lebih besar dibanding 2005”<sup>1</sup>.<sup>1</sup> Keburukan Pemilu 2010 dapat dilihat baik dari banyaknya kasus DPT bermasalah dan kecurigaan dana penyelenggaraan, para kontestan yang memasukkan ijazah palsu, pengerahan massa pemilih dari luar wilayah pelaksanaan Pemilu sampai pada kerusuhan paskapemilu.

Peristiwa kerusuhan Pemilu di beberapa kabupaten menunjukkan para kandidat bersama tim sukses dan parpol pendukungnya kurang serius dalam mengapresiasi Pemilu damai. Kendati secara teoretis pelaksanaan Pemilu diharapkan dapat menjadi momentum peletakan dasar bagi fondasi kedaulatan rakyat dan sistem politik serta demokrasi di aras lokal, namun karena nihilnya kemampuan (bahkan kemauan) mengendalikan konstituen, yang kemudian terjadi adalah kerusuhan. Hasilnya, seperti yang saksikan; nyawa warga melayang, kertas suara terbakar, fasilitas perkantoran yang dibangun dari uang rakyat menjadi rusak. Yang paling fatal adalah kekerasan horizontal antarsesama warga masyarakat, cukup memiriskan hati.

Dari kerusuhan-kerusuhan itu, sangat nyata bahwa rakyatlah yang menjadi korban. Tak dapat dipungkiri bahwa mekanisme kerja demokratisasi di ranah lokal lumpuh dalam berbagai hal. Atau bahkan kerja-kerja demokrasi tidak diperankan secara maksimal oleh para aktornya, atau seluruh komponen demokrasi lokal di daerah.

Tanggal 23 Juni 2010, beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan menggelar Pemilu, masing-masing kabupaten Gowa, Bulukumba, Maros,

---

<sup>1</sup> <http://www.Detiknews.Com/read/2010/06/14/190418/1378149/> Kualitas-pemilu-2010-memburuk.

Pangkep, Barru, Soppeng, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Tana Toraja. Namun sangat disayangkan pesta demokrasi dalam rangka memilih kepala daerah ini, mengisahkan kerusuhan massa yang disertai perusakan sejumlah fasilitas umum dan Pemilukada. Peristiwa kerusuhan Pemilukada yang terjadi di beberapa kabupaten; terutama di Tana Toraja, Soppeng, dan Gowa telah mencoreng demokrasi lokal di Sulawesi Selatan.

Di Tana Toraja , Pemilukada yang diikuti enam pasangan berakhir dengan kerusuhan hanya beberapa jam pasca pencoblosan. Ada pasangan calon Bupati dan wakil Bupati; masing-masing diurut berdasarkan nomor urut, yaitu Victor Datuan Batara, SH - Rosina Palloan, SE. MH (ViSi), Ir. Cosmas Sampe Birana, MS - Daniel Tonglo, SE (Cosmas-Daniel), Ir. Yohanis Embon Tandipayuk, MM - Dr. Ir. Ophirtus Sumule, DEA (EtOs), Ir. Nicodemus Biringkanae - Drs. Kendek Rante (NiKe), Theofilus Allorerung, SE - Adelheid Sosang, SP., MH (Teladan) dan H.M. Yunus Kadir - DR. Ir. Yansen Tangketasik, M.Si. Pesta demokrasi milik rakyat yang seharusnya berakhir dengan kegembiraan, dalam kenyataannya berujung dengan konflik yang cukup memiriskan hati. Pesta yang awalnya meriah berakhir dengan tragis. Kota Makale yang sebelumnya tenang dan damai, berubah menjadi mencekam. Massa bertindak anarkis, merusak fasilitas umum dan Pemilukada dengan membakar kotak suara dan kertas suara. Pemilukada menjadi ajang perang terbuka antar warga. Yang paling memprihatinkan adalah adanya satu korban jiwa.

Sebagaimana berita yang dilansir oleh beberapa media, penyebab terjadinya kerusuhan pemilukada Tana Toraja diduga karena massa pendukung

pasangan tertentu kecewa dan tidak puas atas hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Hal itu, semakin diperkuat dengan hasil quick count dari beberapa lembaga survei yang memenangkan pasangan Theofilus Alloserung-Adelheid Sosang mengalahkan lima pasangan lainnya. Di samping itu, ada dugaan bahwa kericuhan Pilkada Tana Toraja juga dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kinerja aparat penyelenggara dan pengawas pilkada yang dinilai tidak netral.

Akibat dari adanya amuk massa, maka tahapan pemilihan kepala daerah yakni proses penghitungan suara pada saat itu, untuk sementara tidak dapat dilanjutkan. Berangkat dari kegelisahan di atas dan akibat yang ditimbulkan oleh kerusuhan Pemilukada Tana Toraja, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian secara ilmiah.

## B. Fokus Penelitian

Penelitian difokuskan pada factor-faktor penyebab terjadinya kerusuhan Pemilukada Tana Toraja, antara lain:

1. Dugaan adanya politik uang (*nioney politics*).
2. Dugaan adanya ketidaknetralan penyelenggara dan pengawas Pemilukada Tana Toraja.
3. Dugaan adanya ketidaknetralan pihak eksekutif.
4. Dugaan adanya ketidakpuasan pasangan kandidat Bupati dan Wakil bupati peserta Pemilukada Tana Toraja beserta tim pemenang masing-masing pasangan yang kalah atas hasil perolehan suara.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang tersebut di atas, maka adapun rumusan masalah yang akan dicarikan jawabannya melalui penelitian adalah:

1. Bagaimana konflik pemilukada Tana Toraja tahun 2010 terjadi?
2. Mengapa konflik pemilukada Tana Toraja tahun 2010 terjadi?
3. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh pihak penyelenggara dan pengawas pemilukada dalam menyelesaikan konflik pemilukada Tana Toraja tahun 2010?

#### D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui:

1. Konflik yang menyertai Pemilukada Tana Toraja tahun 2010.
2. Penyebab terjadinya konflik Pemilukada Tana Toraja tahun 2010.
3. Langkah penyelesaian konflik Pemilukada Tana Toraja tahun 2010.

#### E. Mamfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan mamfaat secara teoritis dan praktis mengenai pelaksanaan Pemilukada.

##### 1. Mamfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan Pemilukada yang damai tanpa manipulasi dan kekerasan.

##### 2. Mamfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan akan bermamfaat bagi semua komponen pokok demokrasi seperti parpol, kandidat bupati/wakilnya, tim

sukses, organisasi masyarakat civil, penyelenggara dan pengawas Pemilukada Tana Toraja dalam mengantisipasi terjadinya kerusuhan Pemilukada berikutnya. Penelitian ini diharapkan pula akan memberikan sumbangsi bagi pelaksanaan pendidikan politik bagi warga masyarakat Tana Toraja.

#### F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara dengan metode pengambilan sampel purposive. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.